



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN
SABTU KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU TELEPON (0736) 53017
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sppmhkp.bkl@kkp.go.id

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.
di Jl. Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta 10110 Jakarta Pusat 10041

**SURAT PENGANTAR
NOMOR B.688/SPPMHKP.BKL/TU.210/VII/2026**

NO	DOKUMEN /ALAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini terlampir kami sampaikan: Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026 STASIUN PPMHKP BENGKULU BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN	1(satu) berkas	Demikian disampaikan dengan hormat untuk diproses sebagai mana mestinya

Penerima
Sekretaris BPPMHKP

Bengkulu, 22 Juli 2026
Pengirim
Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Woro Nur Endang Sariati

Oscar Daniel Butar Butar

Diterima tanggal,
No.HP

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2026



**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan II (LKJ TW II) Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu (SPPMHKP) menyusun Laporan Kinerja Tahun (LKJ) Triwulan II Tahun 2026. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja dan sekaligus sebagai gambaran inisiatif dan kemampuan yang sedang dan telah dilakukan dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi SPPMHKP Bengkulu.

LKJ ini disusun sebagai pertanggung jawaban Stasiun PPMHKP Bengkulu selama Triwulan II Tahun 2026.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan LKJ ini.

Bengkulu, 22 Juli 2026

Kepala Stasiun PPMHKP Bengkulu,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Oscar Daniel Butar Butar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan	1
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	2
BAB II. RENCANA AKSI SPPMHKP BENGKULU.....	
2.1. Rencana Strategis	5
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	10
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	12
3.3. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP.....	
27	
LAMPIRAN	28

1DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SPPMHKP Bengkulu Tahun 202.....	3
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SPPMHKP Bengkulu Triwulan II Tahun 2026.....	6
Tabel 3.1Capaian Kinerja Triwulan II SPPMHKP Bengkulu Tahun 2026.....	11
Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK1 pada Triwulan II tahun 2026.....	13
Tabel 3.3 Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan II tahun 2026	14
Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II tahun 2026.....	15
Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan II tahun 2026.....	15
Tabel 3.6 Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II tahun 2026.....	16
Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II tahun 2026.....	17
Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II tahun 2026.....	18
Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II tahun 2026.....	19
Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan II tahun 2026.....	20
Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan II tahun 2026	21
Tabel 3.12 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan II tahun 2026	22
Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II tahun 2026.....	24
Tabel 3.18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW II Tahun 2026.....	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	2
Gambar 2. Peta Strategi SPPMHKP Tahun 2026	5
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SPPMHKP Bengkulu Tahun 2026.....	10

IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun PPMHKP Bengkulu pada Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar **107,9%**. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun PPMHKP Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1.** Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu;
- 2.** Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu;
- 3.** Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 4.** Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 5.** Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 6.** Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 7.** Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 8.** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 9.** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 10.** Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 11.** Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu
- 12.** Nilai Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2026

Kinerja keuangan Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan II Tahun 2026 melalui program, pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelauatan dan perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp.2.588.873.000,-**. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2026 mencapai **Rp.1.759.184.922,-** atau sebesar **67.95%**

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja

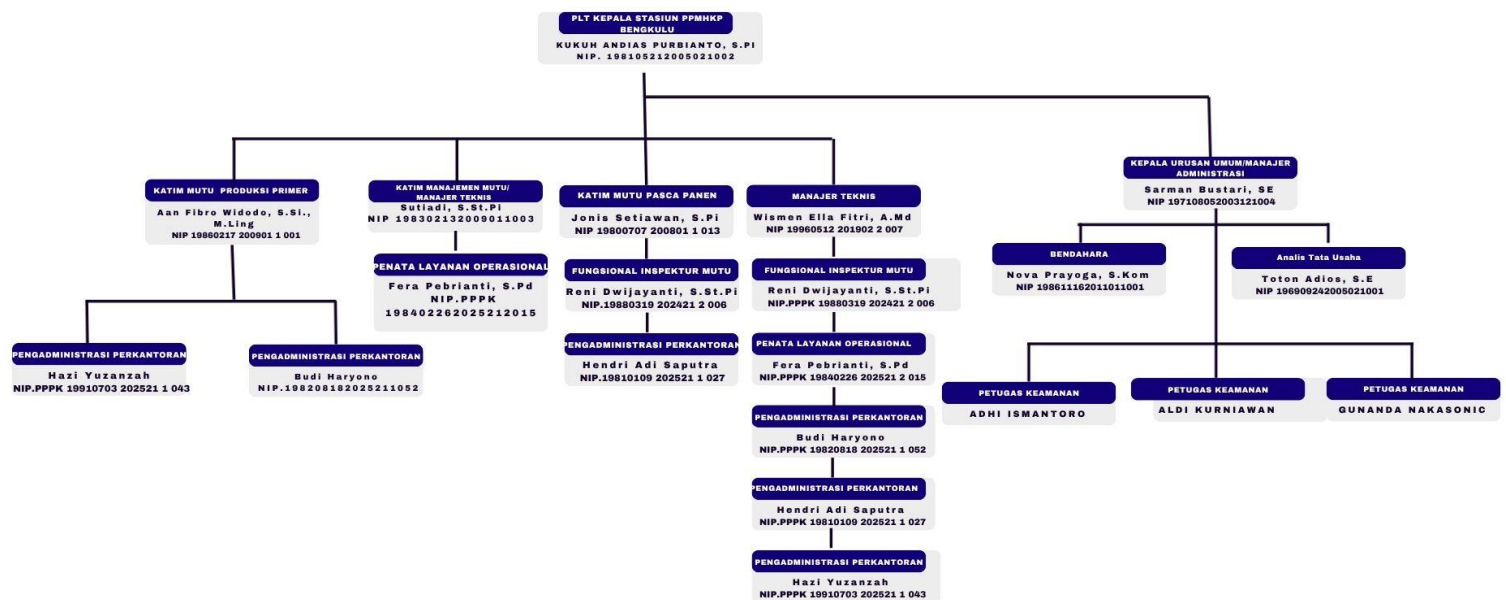
Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2026, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2026 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 35/PERMEN- KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SPPMHKP Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SPPMHKP Bengkulu dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja SPPMHKP Bengkulu Triwulan II Tahun 2026 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai ketepatan rencana aksi dan target tahunan yang telah disusun terhadap capaian kinerja aktual secara berkala atau triwulanan.

1.2 GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu maka Stasiun Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh urusan umum, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Secara detail struktur organisasi Stasiun PPMHKP Bengkulu tahun 2026 seperti pada



Gambar 1 berikut ini :

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PPMHKP Bengkulu

Berdasarkan data kepegawaian Stasiun PPMHKP Bengkulu mempunyai 18 orang pegawai yang terdiri dari 10 orang PNS, 5 orang PPPK dan 3 orang tenaga PJLP atau outsource. Secara garis besar tingkat pendidikan pegawai SPPMHKP Bengkulu adalah 2 orang S2, 8 orang S1, 1 orang D3 dan 7 orang SLTA.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja SPPMHKP Bengkulu 2026

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2026
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72
		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72
		3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang	4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	Nilai	72

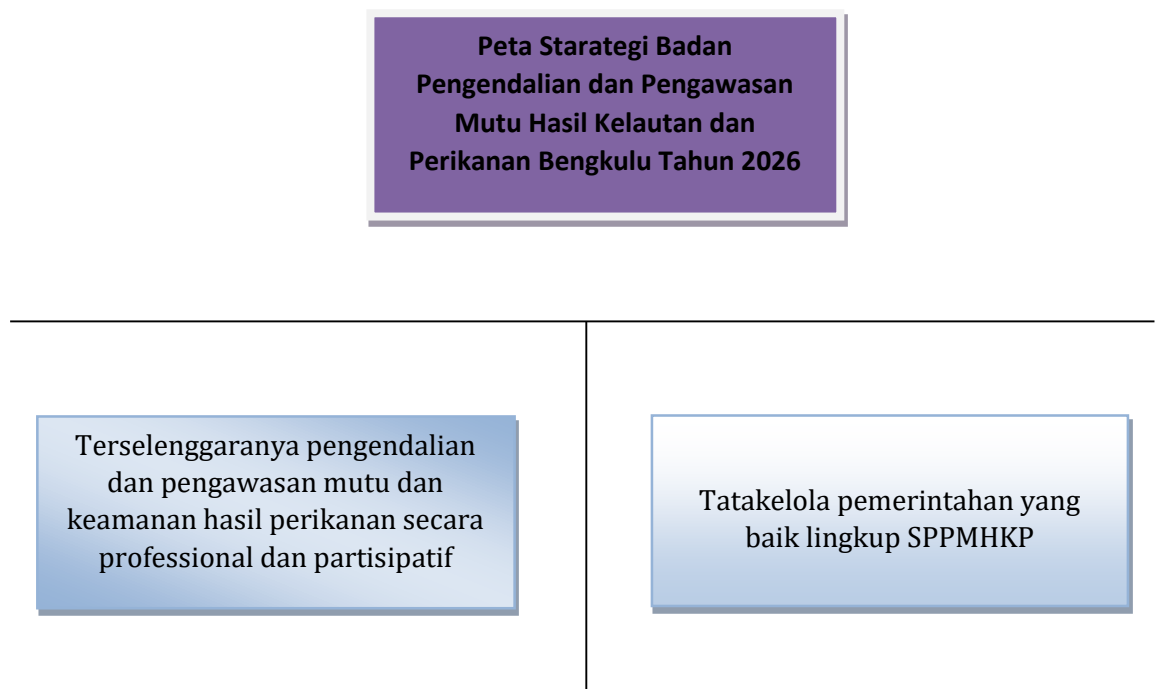
SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2026
	Konsisten Sesuai Standar				
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Indeks	82,5
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	77
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	86,2
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	(Persen)	86
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	92,1
		10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,75
		11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	77
		12	Nilai Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	89

Keterangan: Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120

II. RENCANA AKSI STASIUN PPMHKP BENGKULU

1.1. RENCANA STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan tang ditetapkan. Peta strategis dan indikator kinerja SPPMHKP Bengkulu tahun 2026 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2. Peta Strategi SPPMHKP Bengkulu tahun 2026

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja SPPMHKP Bengkulu Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2026			Tahun 2025		
				Target TW II	Realisasi	Capaian (%)	Target TW II	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	98,61	120	70	125	120
		2 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	120	120	70	75	107,14
		3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71	82,91	116,77	1	1	100

2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4.	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	Nilai	99	0	-	0	0	-
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, Lincak dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu	5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)	Nilai	82,50	75,05	100,07	87	85,23	120
		6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	75	0	-	0	0	-
		7	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	%	86	0	-	0	0	-
		8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)	Nilai Indeks	86	100	116,28	85	100	117,65
		9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	92,10	85,00	94,75	0	0	-

10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	%	100	0	-	0	0	-
11	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	77	100	120	76	99,06	120
12	Nilai Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	%	3,50	97.46	120	88	95,94	109,02

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2026

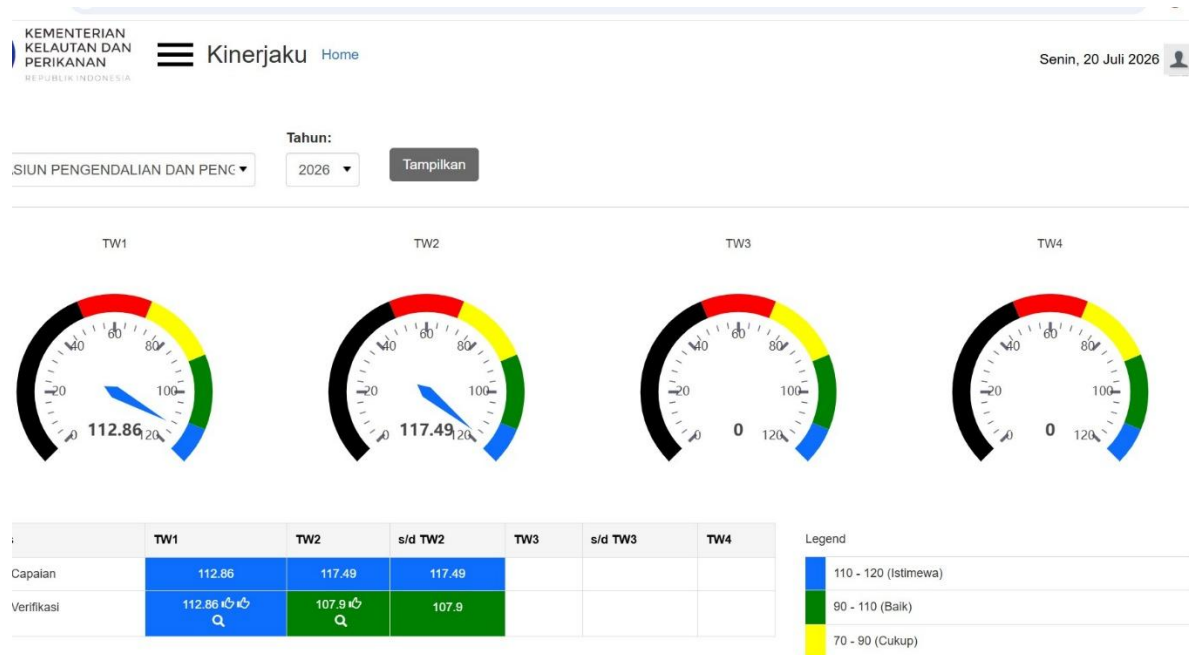
II. EVALUASI KINERJA

2.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu pada Triwulan II Tahun 2026 istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dari triwulan II menunjukkan nilai sebesar **107.9%** berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan II Tahun 2026. Pencapaian ini merupakan kontribusi seluruh satuan kerja SPPMHKP dalam merealisasikan target kinerja yang diperjanjikan. Nilai-nilai capaian tersebut dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 3. Dashboard Capaian IKU Pada SAPK



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Staisun PPMHKP Bengkulu Triwulan II Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target TW II	Realisasi TW II
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	120
		2 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	120
		3 Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71	116,77
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	4 Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)	%	72	120
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu	5 Nilai Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	82,5	75,05
		6 Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	77	
		7 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	86,20	
		8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan	(Persen)	86	116,28

			untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Persen)			
	9		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	92,1	0
	10		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,75	0
	11		Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	77	0
	12		Nilai Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)	Nilai	89	112,57

2.2. ANALISA DAN EVALUASI

SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan dan Perikanan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan. Kegiatan SPPMHKP Bengkulu dari indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar **volume atau jumlah** produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal **yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan** yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
 2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)					
	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	70	100	120	72	98,61	120

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun PPMHK Bengkulu (%)

- Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten baik dalam bentuk sertifikat.
- Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
- Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.
- Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:
 1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Realisasi Sektor Produksi Pasca Panen triwulan I yang telah dicapai yaitu SKP sebanyak 4 UPI dan 5 ruang lingkup yang sudah disertifikasi SKP, HACCP sebanyak 1 UPI.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun SPPMHKP Bengkulu;					
	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	70	100	120	72	120	120

IK 3. Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

- Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.
- Lokasi dari kegiatan pengawasan ini dilakukan di kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar modern, pasar tradisional, supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan lokasi wilayah perairan/pelabuhan perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya.

Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi berupa INPRES 01 pelaporan semester 2.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 3	Nilai Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)				
Tahun 2025			Tahun 2026		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	1	100	71	82,91	116

SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Kegiatan SKIPM Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK 4. Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)

Persentase implementasi terstandar pengendalian dan pengawasan mutu hasil Perikanan merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Implementasi metode terstandar pengendalian serta pengawasan mutu dalam industri perikanan sangat penting untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan sesuai dengan persyaratan pasar, baik domestik maupun internasional

Nilai kualitas penerapan Quality Managemen System (QMS) diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem jaminan mutu untuk unit yang telah dilakukan verifikasi

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control* yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup; 3. Persyaratan Umum; 5. Persyaratan Sumber Daya;

7. Persyaratan Sistem Manajemen

2. Acuan Normatif; 4. Persyaratan Struktural; 6. Persyaratan Proses; ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum 2. Persyaratan Struktural 3. Persyaratan Sumberdaya 4. Persyaratan Proses 5. Persyaratan Sistem Manajemen

Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan I Tahun 2026

IK. 4	Persentase Implementasi Metode Terstandar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan yang Ditetapkan Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	72,00	93,59
					120,00

SK 3. Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel Di Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu

Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel di Lingkup Stasiun SPPMHKP Bengkulu. Kegiatan SPPMHKP Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK 5. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks);

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

1. diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
1	Pendidikan S3	-
2	Pendidikan S2	2
3	Pendidikan S1	10
4	Pendidikan D III/SM	1
5	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
6	Pendidikan SMP/ SD	-

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP Bengkulu dihitung dengan merata-ratakan nilai dariseluruh komponen. Indikator ini merupakan indikator target semester dan telah direalisasikan pada Triwulan II.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 5	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	85	85,23	120	75,00	75,05
					100,07

IK 6. Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 6	Nilai Pembangunan Integritas Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0
					-

IK 7. Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai);

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan” Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM

Hasil evaluasi / Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh unit kerja

Formula:

- Penilaian atas Kinerja lingkup SPPMHKP dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja
- Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
- Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
- Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan I namun ditargetkan tahunan.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 7	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai);					
	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	0	0	-	0	0	-

IK 8. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit Eselon I lingkup KKP sampai dengan waktu pengukuran

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ditargetkan ditriwulan I yang diambil dari aplikasi SIDAK.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 8	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Persen);					
	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	85	100	117,65	86	100	116,28

IK 9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan 13 (tiga belas) variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi

Anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bengkulu didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran

kualitas kinerja menggunakan IKPA. Target pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SPPMHKP Bengkulu yaitu Semester.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 9	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai)					
	Tahun 2025			Tahun 2026		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	85	96,71	113,78	92,10	94,75	111,47

IK 10. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Nilai);

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 10	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	0	0

IK 11. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%);

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Tabel 3.12. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan II Tahun 2026

IK. 11	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (%).				
	Tahun 2025			Tahun 2026	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	76	99.06	120	77	100

IK 15. Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks);

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup SPPMHKP Bengkulu menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <https://ptsp.kkp.go.id/skm/login> Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat diakses oleh pengguna jasa di masing-masing UPT SKIPM Bengkulu.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT SPPMHKP Bengkulu.

Indikator ini merupakan indikator triwulan

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan I I Tahun 2026

IK. 12		Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun PPMHKP Bengkulu (Indeks);			
Tahun 2025			Tahun 2026		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
88	94,84	120	3,50	97,46	120

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun PPMHKP pada tahun anggaran (T.A) 2026 pada DIPA sebesar Rp. **2,735,687,000** Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan II tahun 2026 mencapai Rp. **1.826.104.945** atau sebesar **66.75%**

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan I berdasarkan jenis kegiatan Setelah Revisi Efisiensi/Relaksasi disajikan pada Tabel 3.14 sebagai berikut

Tabel 3.14. Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW II Tahun 2026

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2026		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	2.588.873.000	1.759.184.922	67,95%
2.	Pengendalian Mutu	84.314.000	43.200.000	51,24%
3.	Manajemen Mutu	62.500.000	23.720.000	37,95 0%
Total		2,735,687,000	1.826.104.945	66,75%

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan II berdasarkan jenis Belanja disajikan Setelah Revisi Efisiensi/Relaksasi disajikan pada Tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW II Tahun 2026

No	Kegiatan	Jenis Belanja		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW II (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	1,779,855,000	1.236.442.206	69.47%
2.	Belanja Barang	809,018,000	522.742.716	64,61%
3.	Belanja Modal	0	0	0%
Total		2.735.687.000	1.826.104.945	66,75%

III. PENUTUP

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga

diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun PPMHKP Bengkulu sudah Istimewa dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar

107,9 % pada aplikasi kinerja dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2026.

Upaya yang dilakukan untuk perbaikan pada Triwulan berikutnya:

1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada Triwulan II tahun 2026;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 sesuai jadwal atau rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan tidak menumpuk pada Triwulan berikutnya;
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan Tahun berikutnya

L A M P I R A N